

ANALISIS PENGARUH PDRB, JUMLAH PENDUDUK DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA TOMOHON

Cerly M. Mongdong, Vecky A.J Masinambow, Steeva Tumangkeng

¹²³*Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,*

Universitas Samratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email: cerlymarceliamongdong@yahoo.com

ABSTRAK

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Otonomi daerah diberlakukan sejak dikeluarkannya UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Infrastruktur terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon. Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon. Infrastruktur tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon. Hasil pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Infrastruktur secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon. Nilai F table berdasarkan besarnya $\alpha=5\%$ dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(K-1/3-1)= 2$ dan df untuk denominator $(n-k/12-3)= 9$. Nilai F-statistik yang diperoleh 23.71 sedangkan F-tabel 4.26 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari tingkat $\alpha (0,01)$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB, Jumlah Penduduk dan Infrastruktur secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon.

Kata Kunci: PDRB, Jumlah Penduduk, Infrastruktur dan Pajak Daerah

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah (Riduansyah, 2003).

Penyelenggara otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, pemerintah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber dana bagi penyelenggara pemerintah dan pembiayaan pembangunan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber dana potensial bagi daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonomi yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Rasyid (2002) mengemukakan bahwa otonomi daerah merupakan kesempatan membangun sistem pemerintahan, struktur pemerintahan dan sistem politik dan administrasi yang efektif sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengurus pemerintahan daerahnya, termasuk dalam mengelola pajak daerah.

Mardiasmo (2011) mengemukakan “pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.” Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Pajak daerah termasuk dalam struktur pendapatan asli daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kota Tomohon merupakan salah satu daerah otonom sejak 2003, diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri termasuk sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti pajak. Berikut adalah perkembangan pajak daerah Kota Tomohon dari tahun ketahun:

Tabel 1
Pajak Daerah Kota Tomohon Tahun 2005-2016

Tahun	Pajak Daerah
2005	825.478.490
2006	1.110.362.368
2007	1.000.000.000
2008	2.009.245.617
2009	3.327.372.100
2010	3.357.003.996
2011	4.031.730.282
2012	3.774.798.077
2013	5.458.559.604
2014	9.756.925.375
2015	10.637.396.788
2016	12.435.848.866

Sumber: Tomohon Dalam Angka

Tabel 1 menunjukkan perkembangan pajak daerah Kota Tomohon dari tahun 2005 sampai 2016. Dilihat dari data diatas penerimaan pajak daerah Kota Tomohon sudah semakin baik, walaupun ditahun-tahun tertentu mengalami penurunan penerimaan pajak daerah. Tahun 2005 penerimaan pajak daerah Kota Tomohon sebesar Rp. 825.478.490 juta mengalami peningkatan penerimaan pada tahun 2006 sebesar Rp. 1.110.362.368 juta. Akan tetapi, pada tahun 2007 mengalami penurunan penerimaan pajak daerah menjadi Rp. 1.000.000.000 juta. Tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 2.009.245.617 juta, penerimaan pajak daerah Kota Tomohon terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2011 sebesar Rp. 4.031.730.282 juta pada tahun 2012 turun sehingga penerimaan sebesar Rp. 3.774.798.077 juta, pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 5.458.559.604 juta dan terus mengalami peningkatan penerimaan sampai tahun 2016 menjadi Rp. 12.435.848.866 juta. Dilihat dari penerimaan pajak daerah yang semakin baik setiap tahunnya hal ini menunjukkan bahwa Kota Tomohon sudah mampu mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dari sisi pajak daerah. Berikut adalah perkembangan penerimaan daerah Kota Tomohon untuk Retribusi Daerah dari tahun 2005 sampai 2016. Realisasi pajak daerah Kota Tomohon yang terus membaik dari tahun ke tahun tidak terlepas dari peran beberapa faktor seperti jumlah penduduk, Produk domestik regional bruto (PDRB) dan infrastruktur.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator yang dipakai untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, dengan meningkatnya PDRB maka akan secara langsung berakibat pada kenaikan sektor-sektor pembentuk PDRB yang artinya ketika sektor-sektor itu naik, maka akan ada kenaikan terhadap penerimaan pajak daerah. Salah satu faktor penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah tertentu dalam suatu periode tertentu dapat ditunjukkan oleh data PDRB daerah tersebut. Apabila nilai PDRB mengalami peningkatan maka akan membawa pengaruh positif pada kenaikan penerimaan daerah. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah, sehingga semakin tinggi pula kemampuan masyarakat tersebut untuk membayar Pajak Daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah (Mardiasmo, 1995).

Berikut adalah perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Tomohon dari tahun ke tahun:

Tabel 2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tomohon
Tahun 2005-2016

Tahun	PDRB
2005	485.775
2006	513.214
2007	541.042
2008	589.501
2009	625.401
2010	1.804.312
2011	1.926.920
2012	2.060.549
2013	2.186.140
2014	2.322.032
2015	2.465.405
2016	2.566.689

Sumber: Tomohon Dalam Angka

Dilihat dari tabel 2 perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tomohon setiap tahunnya mengalami peningkatan. PDRB Kota Tomohon tahun 2005 sebesar 485.775 juta rupiah meningkat pada tahun 2006 menjadi 513.214 juta rupiah tahun 2007 meningkat menjadi 589.501 juta rupiah. Tahun 2009 terus meningkat menjadi 625.401 juta rupiah tahun 2010 PDRB Kota Tomohon meningkat menjadi 1.804.312 juta rupiah, tahun 2011 meningkat menjadi 1.926.920 juta rupiah dan tahun 2012 meningkat menjadi 2.060.549 juta rupiah. Tahun 2013 meningkat menjadi 2.186.140 juta rupiah tahun 2014 meningkat menjadi 2.322.032 juta rupiah tahun 2015 meningkat menjadi 2.465.405 juta rupiah dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 2.566.689 juta rupiah. Meningkatnya pertumbuhan PDRB Kota Tomohon yang terus mengalami kenaikan memberikan tanda bahwa Kota Tomohon merupakan kota yang sedang berkembang. Salah satu faktor penting untuk mengukur kondisi ekonomi di suatu wilayah daerah dalam periode tertentu yakni dengan melihat tingkat PDRB di suatu daerah tersebut.

Selain variabel PDRB yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah, variabel jumlah penduduk juga mempengaruhi penerimaan pajak daerah karena pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Dengan adanya penduduk, memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan PAD. Berikut adalah perkembangan jumlah penduduk di Kota Tomohon dari tahun ke tahun:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Kota Tomohon
Tahun 2005-2016

Tahun	Jumlah Penduduk
2005	80.649
2006	81.882
2007	82.684
2008	83.200
2009	83.718
2010	91.913
2011	93.597
2012	95.388
2013	96.973
2014	98.686
2015	100.373
2016	101.981

Sumber: Tomohon Dalam Angka

Perkembangan jumlah penduduk di Kota Tomohon setiap tahunnya mengalami pertumbuhan jumlah penduduk. Tahun 2005 jumlah penduduk Kota Tomohon sebesar 80.649 jiwa meningkat pada tahun 2006 sebesar 81.882 jiwa, tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi 82.684 jiwa pada tahun 2008 meningkat menjadi 83.200 jiwa sampai pada tahun 2016 meningkat menjadi 101.981 jiwa. Peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk bisa meningkatkan produktifitas para pelaku ekonomi yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan juga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah karena kemampuan masyarakat dalam membayar pajak meningkat.. Seperti halnya yang telah dilakukan penelitian oleh Norfridwitya (2006) yang menjelaskan pertumbuhan penduduk, besar kecilnya pendapatan di pengaruhi oleh jumlah

penduduk. Apabila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang di terima akan meningkat karena adanya jumlah penduduk yang produktif didalam perekonomian.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan (Soemardi dan Reini D, 2009). Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan. Sehingga dengan membaiknya infrastruktur daerah nantinya akan berdampak pada membaiknya perekonomian daerah sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan membaik.

Berikut adalah perkembangan infrastruktur berupa panjang jalan di Kota Tomohon dari tahun ke tahun:

Tabel 4
Infrastruktur Panjang Jalan Kota Tomohon
Tahun 2005-2016

Tahun	Panjang Jalan
2005	312,86
2006	314,86
2007	319,86
2008	333,10
2009	341,90
2010	372,58
2011	385,58
2012	429,68
2013	468,68
2014	486,67
2015	513,21
2016	542,71

Sumber: Tomohon Dalam Angka

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan infrastruktur untuk panjang jalan di Kota Tomohon dari tahun ke tahun. Tahun 2005 infrastruktur panjang jalan Kota Tomohon sebesar 312,86 km meningkat pada tahun 2006 panjang jalan Kota Tomohon sebesar 314,86 km meningkat pada tahun 2007 menjadi 319,86 km dan terus meningkat panjang jalan Kota Tomohon menjadi 333,10 km pada tahun 2008. Tahun 2009 meningkat menjadi 341,90 km, tahun 2010 meningkat menjadi 385,58 km, terus meningkat sampai pada tahun 2016 menjadi 542,71 km.

Tinjauan Pustaka

Pajak Daerah

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Pengetian pajak menurut beberapa ahli :

1. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum

(Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk secara langsung. (Thomas Sumarsan, 2009).

2. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2008 : 1).

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dari pengertian pajak daerah tersebut diatas maka dapat dimaknai bahwa pajak daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah itu sendiri.

Produk Domestik Regional Bruto PDRB

Peningkatan nilai tambah dari suatu bahan baku (input) menjadi produk (output) menunjukkan adanya perkembangan perekonomian suatu wilayah. Dalam statistik neraca nasional, perkembangan nilai tambah yang diciptakan oleh berbagai sektor ekonomi seperti sektor pertanian, sektor industri pengolahan, jasa-jasa dsb, dicatat dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto. Dengan demikian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh nilai tambah (*value added*) produksi barang dan jasa dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. (Badan Pusat Statistik).

Produk regional merupakan produk domestik setelah ditambah pendapatan yang mengalir ke dalam daerah/wilayah tersebut, kemudian dikurangi pendapatan yang mengalir ke luar daerah/wilayah. Atau dapat dikatakan bahwa produk regional merupakan produk yang betul-betul dihasilkan oleh faktor-faktor produksi (tenaga kerja, tanah, modal, entrepreneur) yang dimiliki penduduk daerah/wilayah yang bersangkutan. Namun karena masih terbatasnya data untuk memantau pendapatan yang mengalir dari/ke luar suatu

daerah/wilayah, maka antara produk domestik dengan produk regional sampai saat ini diasumsikan sama. (Badan Pusat Statistik).

Penduduk

Penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel tertentu, misalnya umur, jenis kelamin, agama, mata pencarian, bahasa, tempat tinggal, dan lain-lain. Salah satu pengelompokan yang paling sering digunakan adalah pengelompokan penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Pengelompokan penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya.

Mantra (2003) Menjelaskan mengenai komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin dapat ditampilkan dalam bentuk Piramida penduduk, yaitu grafik yang dibuat untuk mencerminkan data kependudukan menurut usia dan jenis kelamin. Penggambaran piramida penduduk dimulai dengan menggambarkan dua garis yang saling tegak lurus. Garis yang vertikal menggambarkan umur penduduk mulai dari nol lalu naik. Kenaikan ini dapat tahunan, dapat pula dengan jenjang lima tahunan. Garis horizontal menggambarkan besarnya jumlah penduduk baik ditampilkan pada skala jumlah yang sebenarnya maupun dalam bentuk persentase

Infrastruktur

Definisi infrastruktur dalam kamus besar bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari publik capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan (Mankiw, 2003).

Menurut Grigg (1998) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini, hal-hal yang terkait dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sistem lingkungan dapat terhubung karena adanya infrastruktur yang menopang antara sistem sosial dan sistem ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada dimasyarakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (J.Kodoatie, 2005).

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan data yang tersedia dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Tomohon dan jenis data yang digunakan adalah *Time series*. Data *Time Series* dari tahun 2005 sampai tahun 2016.

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data dana realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon Tahun 2005-2016
2. Data Produk Domestik Regional Bruto di Kota Tomohon Tahun 2005-2016

3. Data perkembangan jumlah penduduk di Kota Tomohon Tahun 2005-2016.
4. Data Infrastruktur panjang jalan di Kota Tomohon Tahun 2005-2016

Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis tabel dan analisis kuantitatif berupa metode regresi linear berganda. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *Microsoft Excel 2013* dan *Eviews 0.8*.

Analisis Regresi Berganda

Dalam hal untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan analisis linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut variabel bebas (*independent variable*). Model analisis regresi berganda sebagai berikut

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Kemudian dibentuk dalam model ekonometrika dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y	= Pajak
X ₁	= PDRB
X ₂	= Penduduk
X ₃	= Infrastruktur
α	= Konstanta/ Intercept
β	= Koefisien Regresi
e	= Standar Error

Metode kuadrat terkecil/*Ordinary least square* merupakan estimasi titik sampel, karena itu masalah verifikasi estimasi titik tersebut melalui interal estimasi maupun uji hipotesis melalui uji t. dengan menggunakan table distribusi t kita mendapatkan nilai t kritis (t_c) dengan signifikansi t_{α/2} dan df (*degree of freedom*) n-k dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah parameter estimasi termasuk konstanta. (Widarjono, 2016 : 59).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Regresi Berganda

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan *spss* untuk mengetahui pengaruh antara variabel Pajak Daerah (Y1) (variabel dependen) PDRB (X1), Jumlah Penduduk (X2) dan Infrastruktur panjang jalan (X3) (variabel independen) di Kota Tomohon:

Tabel 5
Hasil Estimasi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,078	95,624		-,022	,983
logx1	,197	1,714	,153	,115	,911
logx2	,231	23,772	,022	,010	,992
logx3	3,567	4,802	,784	,743	,479

a. Dependent Variable: logy

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Uji t-statistik

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.3 dapat dijelaskan pengaruh variable PDRB (X1), Jumlah Penduduk (X2) dan Infrastruktur panjang jalan (X3) secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap Pajak Daerah (Y).

Nilai t_{hitung} diperoleh dari hasil perhitungan SPSS sedangkan t_{tabel} diperoleh dari tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 10\%$ dengan derajat kebebasan (df) $n-k$ atau $12-3=9$. Dengan tingkat signifikansi = 0,10 diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1.38303. Nilai t_{hitung} variable PDRB adalah $0.115 < 1.38303$ berarti menerima H_0 dan menolak H_a maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak daerah.

PDRB mempunyai nilai koefisien sebesar 0.197 yang berarti bahwa PDRB mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya apabila PDRB naik sebesar 1% maka penerimaan pajak daerah akan naik sebesar 0.19% *ceteris paribus*. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antara PDRB dengan penerimaan pajak daerah. Artinya, apabila PDRB mengalami kenaikan akan mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah untuk pembangunan program-program pembangunan. selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

Nilai t_{hitung} diperoleh dari hasil perhitungan SPSS sedangkan t_{tabel} diperoleh dari tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 10\%$ dengan derajat kebebasan (df) $n-k$ atau $12-3=9$. Dengan tingkat signifikansi = 0,10 diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1.38303. Nilai t_{hitung} variabel jumlah penduduk adalah $0.110 < 1.38303$ berarti menerima H_0 dan menolak H_a maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak daerah.

Jumlah penduduk mempunyai nilai koefisien sebesar 0.231 yang berarti bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya apabila jumlah penduduk naik sebesar 1% maka penerimaan pajak daerah akan naik sebesar 0.23% *ceteris paribus*. pengaruh tersebut sesuai dengan teori tetapi tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penduduk maka penerimaan pajak daerah juga akan semakin meningkat. Akan tetapi, hasil ini tidak signifikan secara

statistik artinya, pertumbuhan jumlah penduduk tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ery Shiska dan Abu Nizarudi 2011 pengaruh pertumbuhan Penduduk, PDRB, Ekonomi, dan Tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah pada kota Pangkalpinang tahun 2005-2009 yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel pertumbuhan penduduk, mungkin hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya penduduk Kota Pangkalpinang yang belum terdata rapi pada DPPKAD Kota Pangkalpinang sehingga pajak yang terdata belum mencapai target yang optimal.

Nilai t_{hitung} diperoleh dari hasil perhitungan SPSS sedangkan t_{tabel} diperoleh dari tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 10\%$ dengan derajat kebebasan (df) $n-k$ atau $12-3= 9$. Dengan tingkat signifikansi = 0,743 diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1.38303. Nilai t_{hitung} variabel jumlah penduduk adalah $0.479 < 1.38303$ berarti menerima H_0 dan menolak H_a maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen infrastruktur panjang jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak daerah.

Infrastruktur panjang jalan mempunyai nilai koefisien sebesar 3.567 yang berarti bahwa infrastruktur panjang jalan mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya apabila infrastruktur panjang jalan naik sebesar 1% maka penerimaan pajak daerah akan naik sebesar 3,56% *ceteris paribus*. pengaruh tersebut sesuai dengan teori tetapi tidak signifikan secara statistik. Bertambahnya infrastruktur panjang jalan akan meningkatkan mobilitas pelaku ekonomi lebih baik lagi dalam melakukan aktifitas ekonomi. Akan tetapi, pengaruh infrastruktur panjang jalan terhadap penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh secara signifikan. Pembangunan infrastruktur panjang jalan tidak langsung memberikan manfaat untuk pembangunan ekonomi dengan waktu yang singkat butuh waktu yang panjang agar bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi khususnya dalam penerimaan pajak daerah.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen diterima dan demikian sebaliknya. Untuk analisisnya dapat dilihat dari tabel "Anova" sebagai berikut:

Tabel 6
Uji F-Statistik
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,592	3	,531	23,751	,000 ^a
	Residual	,179	8	,022		
	Total	1,771	11			

a. Predictors: (Constant), logx3, logx1, logx2

b. Dependent Variable: logy

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel diatas dapat dijelaskan pengaruh X1, X2 dan X3 secara simultan terhadap (Y). Nilai F table berdasarkan besarnya $\alpha=5\%$ dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(K-1/3-1)= 2$ dan df untuk denominator $(n-k/12-3)= 9$. Nilai F-statistik yang diperoleh 23.71 sedangkan F-tabel 4.26 dan nilai signifikansi sebesar

0.000 lebih kecil dari tingkat α (0,01). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2 dan X3 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel (Y).

Uji Determinasi R²

Tabel 4.5
Uji Determinan
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,948 ^a	,899	,861	,149

. Predictors: (Constant), logx3, logx1, logx2

Berdasarkan Tabel diatas untuk koefisien korelasi (r) diperoleh nilai 0,948 hal ini berarti terjadi hubungan yang sangat kuat antara PDRB, Jumlah penduduk dan infrastruktur terhadap penerimaan pajak daerah. Nilai R² yang diperoleh sebesar 0.899 artinya, variasi perubahan PDRB, Jumlah penduduk dan infrastruktur mempengaruhi penerimaan pajak daerah sebesar 89,9%, sedangkan sisanya (1-.2%) dijelaskan oleh ariable-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon.
2. Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon.
3. Infrastruktur tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon.
4. Secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon

Saran

1. Untuk pemerintah Kota Tomohon hendaknya lebih meningkatkan kualitas pelayanan dalam kinerja pemerintah dalam mengoptimalkan lagi pos-pos penerimaan pajak daerah dan akurasi data subjek dan objek pajak. Sehingga subjek dan objek pajak yang belum terdaftar wajib pajak bisa didaftar sebagai wajib pajak agar penerimaan pajak daerah bisa optimal.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama agar menambah variable lainnya karena berdasarkan hasil pengujian masih ada variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widarjono, Ph.D. 2013.** Ekonometrika. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Baegoes Mantra, Ida 2003.** Demografi Umum. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ghozali, Imam. (2007).** Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS). Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Gujarati, Damodar, 2003,** Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
- Mohammad Riduansyah, 2003,** Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor), Makara, Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2, Desember 2003, Pusat Pengembangan dan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok 16425, Indonesia.
- Mardiasmo, 1995,** Perpajakan III, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- Mardiasmo, 2008,** Perpajakan Edisi Revisi, CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2013).** Perpajakan Edisi Revisi 2013. Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo dan Rachmat Soemitro, 2009,** Perpajakan ,Edisi Revisi Ravika Aditama, Jakarta
- Mankiw, N. Gregory, 2003.** Pengantar Ekonomi. Edisi Kedua. Erlangga. Jakarta
- Rasyid, Riyaas, 2002.** “Otonomi Daerah : Latar Belakang dan Masa Depan”, dalam Syamsudi Haris (ed). Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas. Jakarta : API dan Pathnership.
- Sumarsan, Thomas. 2013.** Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta: Indeks